

ABSTRAK : - Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 36/1999; UU 11/2008 jo. UU 19/2016; UU 14/2008; UU 25/2009; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 82/2012; PP 96/2012; PP 12/2017; PP 2/2018; PP 71/2019; Perpres 95/2018; Perpres 39/2019; Permenkominfo 20/2016; ; Permendagri 70/2019; Permenkominfo 8/2019; PermenPANRB 5/2020; PermenPPN 16/2020; PermenPANRB 59/2020; Peraturan BSSN 4/2021; Perda Kota Depok 3/2015; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perda Kota Depok 2/2019.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Maksud, Tujuan dan Prinsip; Ruang Lingkup; Tata Kelola SPBE; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; Rencana dan Anggaran; Proses Bisnis; Data dan Informasi; Infrastruktur SPBE; Pusat Data Pemerintah Daerah; Jaringan Intra Pemerintah Daerah; Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; Layanan SPBE; Integrasi Layanan; Manajemen SPBE; Manajemen Resiko; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE; Pemantauan dan Evaluasi; dan Pendanaan.

- Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021, diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:
 - 1 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman *Electronic Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok; dan
 - 2 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 40.